

Pembicara Utama 1

AGENDA KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH DI ERA DIGITAL DAN GLOBAL

Prof. Dr. M. Baiquni, M.A.

“Di era digital ini dunia seolah digenggaman tangan”

Pendahuluan

Globalisasi yang sedang kita hadapi berubah semakin cepat dengan perkembangan teknologi digital. Perkembangan yang terjadi saat ini sesungguhnya merupakan evolusi dari berbagai era globalisasi masa lampau sesuai zamannya. Sejarah menunjukkan bahwa secara berkala, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong transformasi sosial dan perubahan lingkungan hidup. Wilayah yang satu berkembang dan mengalami kejayaan, sedang wilayah lainnya masih mengalami kegelapan. Kejayaan suatu bangsa di suatu wilayah juga mengalami pasang surut dan silih berganti. Gelombang globalisasi kali ini mengalami lompatan yang spektakuler yang mempengaruhi kehidupan individu, keluarga, masyarakat dan bangsa.

Posisi geografi wilayah Indonesia sebagai jalur silang dunia, sesungguhnya berkali-kali telah mengalami arus globalisasi masa lampau. Berbagai kerajaan dan pusat permukiman tumbuh dan berkembang, kemudian mengalami surut dan bahkan ada yang punah. Beberapa peninggalan sejarah kejayaan bangsa kita berabad-abad lalu dapat kita saksikan melalui peninggalan Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Kejatuhan Majapahit dan kemunculan Demak menunjukkan bahwa dinamika wilayah mengalami silih berganti. Wilayah yang semula dianggap pinggiran dan wilayah pesisiran mencul menjadi pusat baru. Meredupnya Demak dan munculnya Kerajaan Mataram Baru di pedalaman, sekali lagi menunjukkan dinamika yang silih berganti. Wilayah yang semula pedalaman yang sulit diakses, pada periode berikutnya menunjukkan kemakmurannya. Analisis *spasio-temporal* dapat dikembangkan oleh para geograf untuk mengkaji fenomena tersebut, dapat memperkaya studi sejarah bangsa Indonesia.

Perilaku global selama beberapa dekade terakhir telah menunjukkan pengaruhnya pada dinamika wilayah. Industri tekstil sebagai contoh, telah bergeser dari Jepang ke Korea, kemudian ke Taiwan menuju Indonesia, kini bergeser ke Vietnam dan Banglades. Industri elektronika juga bergeser dari Jepang ke Taiwan dan kini membangkitkan ekonomi Malaysia. Singapura secara drastis selama dekade 70an dan 80an dengan kesadaran lingkungan yang meningkat dan dorongan memilih industri cerdas dan jasa padat modal berteknologi tinggi (*high-tech*), telah memindahkan industri berat dan kotor ke

Pulau Batam atau Johor. Singapura yang sering disebut "negara kota" kemudian memilih industri bersih dan jasa keuangan dan perbankan sebagai *engine of growth*, sehingga ekonominya melesat kedepan bagai "angsa putih terdepan dalam formasi angsa terbang".

Ada empat cara kekuasaan mengendalikan wilayah: Pertama, ketika cara mengendalikan kekuasaan masih mengandalkan kekuatan fisik, maka segenap kekuatan militer menjadi simbol kekuatan suatu kerajaan atau negara. Kedua, pengaruh kekuasaan dilakukan dengan cara perdagangan dimana kaum pedagang dan perusahaan menjadi kepanjangan dari sebuah kerajaan atau negara. Ketiga, kekuasaan dilakukan dengan mengembangkan teknologi dan modernisasi, ketika kaum teknokrat dan birokrat menjadi perangkat dari kekuasaan pemerintahan. Keempat, kekuasaan dengan cara menguasai informasi dan kesadaran publik, ketika setiap insan memiliki akses dan "dunia menjadi rata", sehingga masyarakat hiererki maupun masyarakat kelas semakin luntur yang memungkinkan masyarakat semakin lentur (Baiquni, M. 2010).

Perkembangan global semakin cepat dengan teknologi digital yang semakin mudah diakses melalui komputer dan handphone, seolah dunia telah berada digenggaman tangan. Tulisan singkat ini menyampaikan gagasan bagaimana wilayah pinggiran dapat menjadi pusat-pusat pertumbuhan dengan memanfaatkan keterhubungan lokal dan global di era digital. Ada lima pembahasan berikut ini yang saling bertautan; yaitu (1) Pembangunan vs Keterbelakangan, (2) Pembangunan Yang Tidak Berkelanjutan, (3) Membangun Pusat-Pusat di Pinggiran, (4) Agenda Pembangunan Berkelanjutan, (5) Inovasi Kepemimpinan Pembangunan Berkelanjutan.

Pembangunan vs Keterbelakangan

Pembangunan muncul setelah periode dekolonialisasi, yang merupakan bentuk pengaruh baru negara pemenang perang Amerika dan sekutunya mulai berubah dengan gagasan pembangunan. Pembangunan (*Development*) sebagai gagasan yang berangkat dari Barat dan mulai disebarkan ke negara yang baru saja merdeka. Istilah pembangunan mulai populer ketika Presiden Amerika Harry S. Truman melontarkannya sebagai resep baru untuk mengatasi keterbelakangan negara-negara Selatan:

"We must embark on a bold new paradigm for making the benefits of our scientific advances and industrial progress available for the improvement and growth of underdeveloped areas" (Esteva, G. 1992).

Secara sistematis, ide pembangunan disebarkan ke seluruh dunia melalui berbagai program pembangunan. Pada akhir tahun 1950an banyak pemuda Indonesia memperoleh beasiswa untuk belajar di Amerika dan setelah kembali ke tanah air membawa gagasan pembangunan untuk dikembangkan di Indonesia. Para intelektual muda yang telah mengenyam pemikiran Amerika

(Barat) ini di kemudian hari menjadi pemimpin, menjadi agen melalui program-program pembangunan di Indonesia. Penyebar gagasan pembangunan melalui pendidikan tersebut hanya salah satu strategi, di antara strategi lain seperti bantuan dan hutang luar negeri, transfer teknologi, relokasi industri, investasi modal asing, penguasaan jaringan keuangan dan perbankan, serta pengaruh budaya dan arus informasi (Baiquni dan Susilawardani, 2002).

Pembangunan semakin mengglobal dan menguat digerakkan oleh lembaga internasional seperti *United Nations*, *The World Bank*, *International Monetary Fund*. Berbagai kebijakan ekspansi kapital negara maju, dengan dalih bantuan luar negeri, menyebarkan gagasan dan program pembangunan bagi negara sedang berkembang. Program-program pembangunan diadopsi negara berkembang untuk melakukan modernisasi dan industrialisasi di berbagai sektor kehidupan.

Ekspansi modernisasi ini oleh Ian Roxborough (1986) dalam bukunya "Teori-teori Keterbelakangan" terjemahan dari buku asli *Theories of Underdevelopment* (1979), dibahas secara kritis yang dalam pandangannya pembangunan justru menghasilkan sejumlah keterbelakangan. Ada banyak masalah dalam pembangunan yaitu: (1) generalisasi yang berlebihan terhadap realitas di negara sedang berkembang yang amat beragam; (2) penerapan program pembangunan yang ahistoris yang sering bertentangan dengan dinamika masyarakat yang berakibat pada kegagalan bahkan menyebabkan ketergantungan.

Dean K. Forbes (1986) pun menganalisis keterbelakangan dari perspektif geografi, mengenai perbedaan tingkat pendapatan ekonomis antar wilayah timbul akibat cara pandang ekonomi politik atau teori ketergantungan. Ia juga mengingatkan bahwa teori besar itu memiliki kelemahan dan tidak mampu menjelaskan masalah secara lengkap dan proporsional. Teori-teori besar melupakan situasi yang khas dan keragaman suatu wilayah yang tidak secara mudah diasumsikan secara general dan generik.

Ketergantungan negara-negara sedang berkembang terhadap negara-negara maju dicirikan oleh ketergantungan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan, tenaga ahli, informasi, pasar dan keuangan (modal). Pada periode 1960-1980 ketergantungan ini ditandai dengan kekuatan negara-negara maju yang mendominasi pembangunan di negara berkembang. Kemudian pada decade 1980-2000 terjadi perubahan dengan munculnya berbagai negara baru yang tumbuh semakin kuat. Pada decade 1990an terjadi peristiwa besar, yaitu adanya keruntuhan Uni Soviet menjadi negara-negara baru di Eropa Timur dan adanya krisis Asia pada 1997 yang menandai peristiwa penting menjelang pergantian millennium.

Duddley Seers (1979) mengungkapkan suatu negara dikatakan gagal apabila kemiskinan semakin banyak, pengangguran semakin luas dan kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar komunitas semakin lebar.

Tiga aspek penting yang dikemukakan seorang pemikir pembangunan itu, kiranya relevan untuk ditambahi dengan dua aspek yang penting yaitu “pembangunan dikatakan gagal apabila kerusakan lingkungan terjadi dimana-mana dan kemaksiatan merajalela”. Penulis menganggap penting dua aspek ini, mengingat banyaknya bencana alam akibat kerakusan manusia yang menimbulkan kerusakan pembangunan. Inti persoalannya terletak pada meluasnya dekadensi moral akibat ambisi yang tidak terkendali, kesemuanya itu dapat menghancurkan kehidupan bangsa.

Pembangunan Yang Tidak Berkelanjutan

Secara singkat peradaban manusia mengalami berbagai perubahan yang ditandai dengan mata pencaharian, pola permukiman, penemuan dan pengembangan teknologi, struktur sosial dan tata kekuasaan. Pertama, peradaban masyarakat zaman batu ditandai dengan mata pencaharian berburu dan meramu, mereka masih tinggal di gua-gua dan berpindah-pindah, teknologi sederhana berupa kapak batu dan perlengkapan dari kulit hewan dan kayu, masyarakat hidup berkelompok dalam tatanan yang sederhana. Kedua, peradaban berkembang menjadi masyarakat pertanian yang mengolah lahan dan memelihara tanaman dan ternak, mereka mulai membentuk satuan permukiman dan mulai menetap tinggal di rumah kayu, teknologi mulai memanfaatkan tenaga hewan sebagai alat angkut dan alat pengolah makanan, masyarakat mulai memiliki struktur dan berbagai fungsi, serta tata kekuasaan yang hierarkis. Ketiga, masyarakat industri yang dicirikan mata pencaharian yang semakin kompleks (eksploitasi, manufaktur, dan jasa) dengan peradaban kota, urbanisasi meningkat pesat dan mereka tinggal di gedung bertingkat pencakar langit, teknologi modern skala besar memudahkan manusia semakin menguasai alam, jumlah penduduk meledak dari 1 miliar di era Revolusi Industri menjadi lebih dari 7 miliar saat ini, tata sosial semakin rumit dan kekuasaan semakin tidak teratur dalam arti mudah mengalami konflik, konflik yang paling dahsyat adalah benturan peradaban manusia dengan tata alam. Keempat, masyarakat informasi yang mengembangkan beragam pilihan mata pencaharian, dunia semakin kecil ‘dalam genggam tangan’ dan setiap orang merasa menguasai dunianya sendiri, teknologi semakin canggih, tata sosial tidak berhierarki secara formal atau tata dunia menjadi datar (*the world is flat*) (Baiquni, M. 2014).

Dalam konteks Indonesia, keempat peradaban tersebut hidup dalam satu zaman saat ini. Kita masih dapat menemukan masyarakat yang berburu dan meramu di hutan belantara, pegunungan tinggi dan pelosok pedalaman serta kepulauan kecil yang terpencil. Sekaligus kita menyaksikan masyarakat modern berbasis informasi yang tinggal di kota atau mereka sedang berlibur di wilayah terpencil namun selalu terhubung dengan dunia dalam genggam tangannya. Kebijakan dan strategi pembangunan yang dirumuskan untuk melayani masyarakat yang begitu kompleks ini tentu memiliki tantangan tersendiri.

Monokulturisasi pembangunan di negara kepulauan yang beragam alam dan budayanya ini, menyebabkan persoalan-persoalan pembangunan yang tidak berkelanjutan. Krisis Asia pada 1997 dimulai dengan krisis moneter, berlanjut krisis ekonomi bertambah dengan krisis ekologi ditandai kemarau panjang, mengakibatkan krisis multidimensi hingga perubahan politik dengan berhentinya Presiden Soeharto pada 20 Mei 1998. Berbagai tanda-tanda krisis dapat dikaji pada buku berikut ini.



Membangun Pusat-Pusat Di Pinggiran

Kenichi Ohmae (1995) dalam bukunya *"The End of the Nation State: The Rise of Regional Economies"* mengemukakan adanya kekuatan 4 (empat) I yang bergerak bebas tanpa batas-batas negara, yaitu industri, investasi, individu dan informasi. Sinergi dari keempat I tersebut membuka batas-batas administrasi suatu negara dan membuat transformasi suatu wilayah lebih makmur dari wilayah lainnya. Sinergi tersebut membuat wilayah pinggiran dan desa-desa dapat berinteraksi satu dengan yang lain secara global dalam meraih perkembangan yang paling maju. Kota tidak lagi merupakan pusat dari hinterland disekitarnya, desa-desa punk ini di era digital dapat menjadi simpul-simpul dari jaringan perkembangan dunia.

Membangun Pusat-Pusat di Pinggiran menyajikan tulisan reflektif evaluatif yang bersifat dekonstruksi wacana dan praktek pembangunan yang selama ini terlalu terpusat dan selalu dari atas. Pusat seringkali hanya satu dan terletak di tengah serta berperan sangat dominan, namun kali ini penulis ingin mengajukan gagasan membangun pusat-pusat di pinggiran. Paradigma pembangunan Indonesia yang dianut selama ini tidak saja kebarat-baratan, tetapi juga ke darat-daratan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki

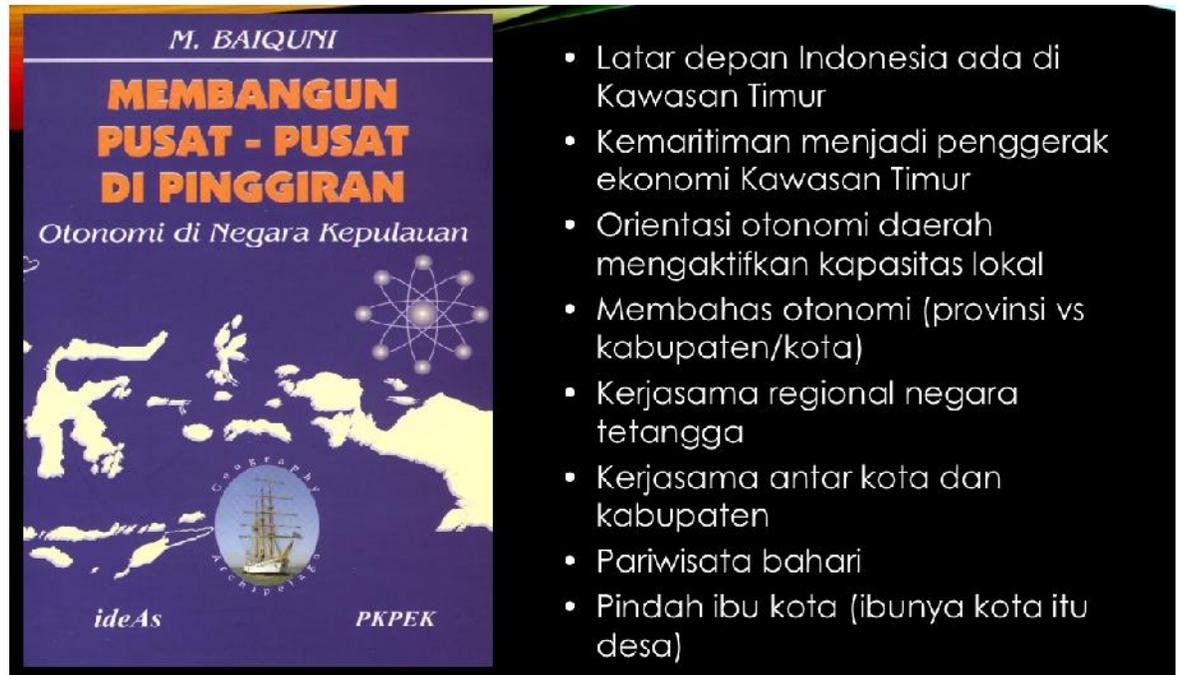
keragaman ekosistem dan kemajemukan masyarakat serta tingkat perkembangan yang berbeda-beda. Keragaman itu dirangkai dalam bentuk NKRI sebagaimana yang tercermin dalam *Bhinneka Tunggal Ika*. Otonomi memberikan peluang berseminya berbagai keunikan dan keunggulan masing-masing daerah, sementara itu globalisasi dapat membuka prospek bagi wilayah pinggiran. Guna mewujudkan perubahan masa depan yang lebih baik, maka diperlukan upaya merumuskan paradigma pembangunan yang sesuai dengan karakter wilayah kepulauan dan dinamika masyarakat majemuk.

Upaya membangun wilayah pinggiran atau membangun dari pingiran ini menjadi kebijakan penting Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Nawacita nomor 3 menyebutkan **“Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”**. Wilayah pinggiran umumnya terbelakang dan kurang diperhatikan oleh pusatnya. Dengan adanya otonomi, maka pemerintah daerah dan segenap pelaku pembangunan dapat bahu-membahu merubah dirinya membangun pusat-pusat baru. Tentu saja dibutuhkan kemampuan merumuskan gagasan baru dan pembaharuan kebijakan hingga terwujud dalam perubahan nyata di tengah-tengah masyarakatnya.

Suatu gagasan besar yang dikemukakan dalam buku ini adalah upaya memindahkan ibukota. Jakarta 100 tahun ke depan apakah masih dapat dipertahankan sebagai ibukota Indonesia? Kini Jakarta telah sarat dengan beban berat yang harus ditanggungnya. Berbagai fungsi kota sebagai pusat politik dan pemerintahan, pusat perdagangan dan industri, pusat kebudayaan dan seni, segala pusat bertumpuk di Jakarta.

“Ibunya kota itu desa” kata filusof Damardjati Supadjar, maka memindahkan ibukota itu membuat orientasi baru pembangunan yang semula sangat berbasis kota menjadi berpusat di desa-desa. Berbagai masalah menumpuk di pusat kota, sehingga harus didistribusikan ke desa-desa. Otonomi membawa peluang untuk mengurangi beban pusat. Pemindahan ibukota bukanlah mimpi dalam jangka panjang. Kita dapat belajar dari sejarah bahwa pusat-pusat kerajaan pernah mengalami pasang surut dan tidak mungkin langgeng sepanjang zaman.

Gagasan “Membangun pusat-pusat di pinggiran” memang perlu dikaji lebih mendalam dengan memfokuskan pada beberapa daerah kabupaten dan kota yang memungkinkan untuk dikembangkan sebagai pusat baru. Peluang otonomi dan prospek globalisasi membawa angin perubahan, tinggal bagaimana kita mensikapi dan mewujudkannya (Baiquni, 2004).



Di era digital dan global ini menjadi kesempatan bagi wilayah pinggiran untuk bangkit menjadi pusat-pusat pembangunan. Pembangunan tidak hanya terpusat di satu pulau Jawa dan ibukota Jakarta, tetapi memungkinkan untuk dikembangkan jejaring pusat-pusat pertumbuhan baru melalui daerah otonom kota dan kabupaten. Berbagai upaya dapat dilakukan, baik mengembangkan inisiatif masyarakat dari dalam (Development from Within), kerjasama lintas sektor dan aktor hingga agenda global SDGs yang diterapkan dalam pembangunan wilayah. Berikut beberapa contoh agenda kebijakan pengembangan wilayah pinggiran (Baiquni, 2004).

a. Kerjasama Ekonomi Regional

Pada tingkat regional nampak adanya kerjasama untuk mengembangkan wilayah pinggiran menjadi pusat-pusat baru, terutama diantara negara-negara ASEAN. Trend kerjasama ekonomi regional mulai menjadi kenyataan kekuatan ekonomi baru menjelang pergantian millenium baru. Ada tiga aspek penting yang perlu diperhatikan dalam kajian kerjasama regional ini, yaitu aspek pertumbuhan ekonomi, aspek integrasi kelembagaan, aspek sinergi sosial dan sustainabiliti. Kompetisi ekonomi dengan negara tetangga seringkali merupakan potensi konflik, sehingga perlu wadah regional atau forum dialog untuk mengubah potensi konflik menjadi kerjasama ekonomi. Di kawasan ASEAN telah nampak adanya kerjasama ini dalam bentuk kegiatan ekonomi regional seperti Sijori (Singapura, Johor dan Riau), IMT-GT (Indonesia, Malaysia, Thailand - Growth Triangle), BIMP-EAGA (Brunai, Indonesia, Malaysia, Philipina - East ASEAN Growth Area).

Proses kerjasama ekonomi regional merupakan upaya untuk menjalin keunggulan komparatif wilayah tersebut dan membangun keunggulan kompetitif dalam menghadapi blok ekonomi lain. Ekonomi Jepang, Kaname Akamatsu, melukiskan proses semacam itu menggunakan paradigma "Formasi angsa terbang" (Soesastro, 1990). "Angsa" paling depan memimpin kemana arah dan manuver terbang yang diikuti oleh anggota kelompok lainnya. Singapura merupakan "angsa terdepan" bagi Sijori.

b. Mengembangkan Otonomi Seluas-luasnya

Kerjasama ekonomi regional semacam ini diharapkan sejalan dengan proses desentralisasi dan otonomi daerah, dinamana masyarakat dapat lebih berperan dalam menentukan arah pembangunan di daerahnya dan memperoleh manfaat pembangunan secara adil. Tentu saja harapan ini memerlukan serangkaian upaya seperti peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan teknologi tepat guna, kemitraan usaha, dan kerjasama pengembangan ekonomi secara regional dengan negara tetangga. Kebijakan dan pelaksanaan pembangunan tersebut diharapkan dapat terwujud secara adil dan juga memperhatikan kelestarian sumberdaya bagi generasi mendatang; dengan kata lain proses pembangunan diarahkan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

c. Pengembangan Predesaan Agropolitan

Agropolitan yang kemukakan oleh Friedmann mencoba mengembangkan kota-kota kecil (kecamatan dan kabupaten) sebagai pusat pengembangan agribisnis yang melayani perkembangan pedesaan yang berbasis pertanian. Kota-kota Agropolitan dapat berperan mensuplai input pertanian dan mengolah hasil pertanian menjadi bahan yang memiliki nilai tambah sebelum diperdagangkan pada pasar regional dan global. Gagasan ini kurang mendapat tanggapan maupun jauh dari angan-angan. Kebijakan pembangunan Orde Baru yang sentralistis dan otoriter telah membuat kota-kota besar semakin berkembang tak terkendali dan tidak ramah lingkungan.

d. Pengembangan Pinggiran Kota Dalam Konstelasi Kerjasama Antar Kota

Kecenderungan yang sedang berkembang pada era 1990an muncul dengan aglomerasi kota kerjasama antar kota bahkan antar propinsi Wilayah Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi) berkembang kemudian muncul model-model lain seperti Gerbangkertasusila (Surabaya dan sekitarnya), Joglosemar (Jogya, Solo, Semarang), BandungRaya, Medan Belawan, dll. Kecenderungan ini memerlukan perencanaan yang lebih luas, tidak hanya melihat wilayah secara sendiri tetapi melihat konstelasi wilayah terhadap kota-kota global lainnya Pengembangan wilayah semacam ini memerlukan koordinasi dan peningkatan kemampuan institusi (*institutional building*) agar masing-masing instansi di daerah lebih berperan menuju otonomi daerah.

e. Memberikan Perhatian Pada Masyarakat Wilayah Pinggiran

Wilayah yang selama ini dianggap pinggiran (*frontier region*) perlu dikembangkan dengan melibatkan pengembangan masyarakat luas, terutama penduduk asli memperoleh manfaat dan kesejahteraannya meningkat. Belajar dari pengalaman Sijori, keuntungan dari kerjasama ekonomi tersebut adalah mereka yang kuat baik dalam modal, teknologi maupun lobi. Bagi masyarakat lokal masih banyak yang belum memperoleh manfaat secara adil dari proses pembangunan di wilayahnya (Sasono, 1993). Oleh karena itu pengembangan kerjasama ekonomi regional selanjutnya perlu diikuti kemitraan diantara para pelaku pembangunan (*stakeholders*) dan melakukan penguatan (*empowerment*) kelompok masyarakat secara luas.

f. Kemitraan Pelaku Pembangunan

Kerjasama segitiga antara pemerintah, masyarakat dan dunia bisnis merupakan kuni bagi transformasi wilayah yang adil dan berkelanjutan. Dasar bagi kerjasama ini adalah adanya saling percaya (*trust*) antar pelaku pembangunan, meskipun masing-masing memiliki visi dan kepentingan yang kadangkala berbeda. Rasa saling percaya ini menjadi pondasi bagi dinamika sosial, ekonomi dan politik dalam rangka kehidupan bersama membangun bangsa.

Franis Fukuyama dalam bukunya *Trust: The Social Virtues and The reation of Prosperity* (1995) menyoroti aspek-aspek budaya yang mendasari pertumbuhan ekonomi di Asia Timur. Menurutnya kepercayaan masyarakat merupakan dasar yang penting bagi pertumbuhan ekonomi Asia. Kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial dan politik masyarakat luas. Dengan preposisi seperti itu, maka reformasi ekonomi dengan sendirinya memerlukan reformasi politik dan sosial. Transformasi wilayah, maka sesungguhnya atau intinya adalah transformasi sosial yang ditentukan oleh kerjasama yang erat berdasarkan nilai keadilan dan kepercayaan diantara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Agenda SDGs: Sinergi Lintas Sektor Dalam Pembangunan Wilayah

Sejarah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat dilacak dari tahun 1972 ketika sejumlah negara bertemu dalam konferensi *United Nations Human and Environment* di Stockholm. Pada 1992 diselenggarakan konferensi *UN Environment and Development* di Rio de Janeiro. Pada konferensi tersebut Pembangunan dan Lingkungan diintegrasikan sebagai agenda penting yang dikenal dengan Agenda 21. Dari rangkaian konferensi tersebut dan ratusan konferensi lainnya mendorong untuk dikembangkanlah kesepakatan untuk mencapai *Millennium Development Goals* (MDGs) disepakati pada Millennium Summit tahun 2000.

Paragraph 246 of the Future We Want outcome document forms the link between The Rio +20 agreement and the Millennium Development Goals: "We recognize that the development of goals could also be useful for

pursuing focused and coherent action on sustainable development." The goals should address and incorporate in a balanced way all three dimensions of sustainable development (environment, economics, and society) and their interlinkages. The development of these goals should not divert focus or effort from the achievement of the Millennium Development Goals" Paragraph 249 states that, "the process needs to be coordinated and coherent with the processes to consider the post-2015 development agenda." Taken together, these two paragraphs paved the way to bring together the development agenda centered on the Millennium Development Goals (MDGs).

Masalah pembangunan sangat kompleks sebagaimana telah dijelaskan diatas, dari masalah kemiskinan hingga daya dukung lingkungan, mesti difahami secara komprehensif dan diatasi melalui perencanaan yang terpadu dan pelaksanaan secara bertahap. Mahbubul Haq (1983) mengingatkan bahwa pembangunan dunia masih meninggalkan masalah kemiskinan di berbagai belahan dunia. Masalah pembangunan yang tidak berkelanjutan juga disebabkan oleh kerakusan manusia yang meneksplotasi sumberdaya alam dan membuang polusi ke habitat hidup manusia (Baiquni dan Susilawardani, 2002).



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) merupakan seperangkat target yang berhubungan dengan pengembangan internasional di masa mendatang. Target-target ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dipromosikan sebagai Tujuan Global untuk Pembangunan

yang Berkelanjutan. SDGs ini melanjutkan pencapaian MDGs (Tujuan Pembangunan Milenium) yang selesai terhitung mulai akhir 2015. SDGs mulai dikembangkan awal tahun 2016 hingga 2030. Ada 17 tujuan dan 169 target spesifik untuk tujuan-tujuan tersebut.

1. Menghapuskan kemiskinan: berupaya mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di semua tempat.
2. Menghapuskan kelaparan: mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
3. Hidup sehat: memastikan hidup yang sehat dan menggalakkan kesejahteraan untuk semua usia.
4. Pendidikan berkualitas: memastikan pendidikan berkualitas yang terbuka dan setara serta menggalakkan kesempatan untuk belajar sepanjang umur hidup pada semua orang.
5. Kesetaraan gender: mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan anak perempuan.
6. Air bersih dan sanitasi: memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkesinambungan atas air dan sanitasi untuk semua orang.
7. Energi yang bisa diperbarui dan terjangkau: memastikan akses pada energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern bagi semua orang.
8. Ekonomi dan pekerjaan yang baik: menggalakkan perkembangan ekonomi yang berkesinambungan, terbuka, dan berkelanjutan, lapangan kerja yang utuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Inovasi dan infrastruktur yang baik: membangun infrastruktur yang tahan lama, menggalakkan industrialisasi yang berkesinambungan dan terbuka, serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan: mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara.
11. Kota dan komunitas yang berkesinambungan: membuat kota dan pemukiman manusia terbuka, aman, tahan lama, serta berkesinambungan.
12. Penggunaan sumber-sumber daya yang bertanggung jawab: memastikan pola-pola konsumsi dan produksi yang berkesinambungan.
13. Tindakan iklim: mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan pengaruhnya.
14. Lautan yang berkesinambungan: melestarikan dan menggunakan samudra, laut, dan sumber-sumber daya maritim secara berkesinambungan untuk pengembangan yang lestari.
15. Penggunaan tanah yang berkesinambungan: melindungi, mengembalikan, dan menggalakkan penggunaan yang lestari atas ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkesinambungan, memerangi penggundulan

hutan, dan memperlambat serta membalikkan degradasi tanah serta memperlambat hilangnya keragaman hayati.

16. Keadamaian dan keadilan: menggalakkan masyarakat yang damai dan terbuka untuk pengembangan yang lestari, memberikan akses pada keadilan untuk semua orang dan membangun institusi yang efektif, bertanggung jawab, serta terbuka di semua tingkatan.
17. Kemitraan untuk pengembangan yang lestari. Memperkuat cara-cara penerapan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pengembangan yang berkesinambungan.

Dalam konteks pembangunan wilayah di Indonesia, 17 tujuan tersebut dikerjakan oleh berbagai sektor dengan kelembagaan yang amat kompleks. Di tingkat pusat ada kementerian, lembaga, badan, komisi dan dewan (ini dan itu) yang jumlahnya sangat banyak dan kewenangannya juga beragam. Kompleksitas kelembagaan tersebut juga diperinci menjadi kewenangan provinsi, daerah otonom (kota dan kabupaten), hingga kecamatan dan desa. Pada tingkat pemerintahan desa, berbagai sektor terlibat dalam pembangunan pada lapis bawah. Tidak dapat dipungkiri, bahwa pelaksanaan pembangunan wilayah kadang mengalami tumpang tindih antar sektor dan kesenjangan antar aktor yang memerlukan inovasi kepemimpinan untuk melakukan integrasi dan sinergi antar sektor maupun aktor.

Inovasi Kepemimpinan dan Kelembagaan

Kepemimpinan terkait dengan tiga hal, yaitu karakter dan perilaku yang memimpin, karakter dan perilaku yang dipimpin, serta sistem dan struktur organisasi kepemimpinan yang berlaku. Menurut Tim Hindle (2008) telah banyak tulisan membahas mengenai karakter dan perilaku para pemimpin, tetapi kurang banyak pembahasan mengenai mereka yang dipimpin dan system serta struktur organisasi kepemimpinan. Sehingga seringkali muncul pertanyaan apakah para pemimpin itu dibentuk atau terlahir dengan sendirinya? Beragam pendapat akan bermunculan merespon pertanyaan ini.

Di masa kerajaan dan kehidupan kelompok masyarakat yang sederhana, pemimpin seringkali dilahirkan dan terkait dengan garis keturunan atau titisan orangtua leluhurnya. Mereka yang mewarisi tahta kerajaan biasanya juga anak turun raja atau pemimpin dalam suatu komunitas atau kelompok suku. Penjelasan bisa jadi terkait dengan kualitas hidup raja atau pimpinan suku yang memungkinkan keluarganya dan anak turunnya mendapatkan asupan gizi makanan yang unggul, fasilitas yang serba tersedia, dan pelayanan yang prima.

Kini zaman telah berubah lebih terbuka dan memungkinkan setiap orang bisa mengembangkan diri dan mengoptimalkan potensinya. Seorang anak petani dari desa bisa menuntut ilmu belajar hingga perguruan tinggi, meniti karir dari bawah sampai presiden, membuat karya dari hasta karya hingga kaya raya. Banyak contoh disekitar kita yang membuktikan bahwa kepemimpinan tidak saja terlahir begitu saja, tetapi juga dibentuk oleh lingkungan keluarganya, sistem dan struktur masyarakatnya, serta tantangan kehidupan dan kodrat hidupnya.

Pemimpin itu memang orang yang berbeda dari kebanyakan. Ia memang harus menjadi pemberani disaat yang lain takut, ia seorang yang optimis ketika lainnya pesimis, ia harus percaya diri ketika yang lain mulai goyah, ia seorang yang tegar ketika yang lainnya telah layu lunglai, ia seorang yang tekun ketika yang lain lalai, ia seorang yang bisa menginspirasi dan menjadi contoh teladan bagi para pengikutnya.

Pemimpin tidak muncul begitu saja, ia seringkali ditempa ujian dan cobaan yang berat dalam kehidupannya. Orang yang sedang diuji bisa terkait dengan ujian berupa kesulitan hidup berupa kesengsaraan dan kegagalan, tapi yang lebih sulit adalah ujian disaat kesenangan dan kemenangan sedang melingkupinya. Kunci agar lulus ujian adalah mensikapi dengan sabar ketika diuji dengan kesulitan hidup dan mensikapi dengan syukur ketika diuji dengan kesenangan. Mereka yang teruji akan mendapatkan tempat yang lebih tinggi, dan semakin tinggi posisinya akan semakin banyak dan besar ujiannya.

Pemimpin tidak berjalan sendirian, ia berada dan bersama mereka yang dipimpinya. Pemimpin memberikan inspirasi, memberi arah instruksi, mengembangkan inovasi, memperluas informasi, menggerakkan implementasi, mengendalikan intervensi, dan mengembangkan institusi. Sepertinya tugas ini sangat berat, namun intinya pemimpin itu mengajak mereka yang dipimpinya bergerak menuju atau berkarya mewujudkan mimpi menjadi kenyataan, yaitu suatu kondisi dan keadaan yang lebih baik (Baiquni, 2014).

Pemimpin dalam kaitannya dengan pelaksanaan SDGs Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memerlukan kemampuan inovasi terkait dengan mengkoordinasikan beragam sektor dan mensinergikan beragam aktor pembangunan. Pemimpin yang memiliki inovasi memang memiliki karakter berani, cerdas, berwawasan luas, dan mampu mewujudkan tindakan nyata. Pemimpin daerah dituntut mampu untuk berkomunikasi dengan rakyat, membangun kesefahaman, menggerakkan gotongroyong mengatasi masalah dan mengembangkan potensi, bergerak dan melangkah menuju arah tujuan yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan (Bintarto, 1983 dan Baiquni, 2009).

Upaya untuk mewujudkan inovasi terkait dengan wawasan pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan dan riset aksi. Platform daya sing bangsa terletak pada kualitas sumberdaya manusia yang terdidik dan menguasai pengetahuan (knowledge base society) yang tercermin dari perilaku dan produktivitas yang berguna bagi semesta (Zuhal, 2010). Kepemimpinan inovatif perlu dikaji, apa yang menjadi tantangan dan hambatan di lapangan. Inovasi perlu bukti, dan bukti dapat dikaji dari perubahanyang nyata dan dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan kajian melalui wawancara mendalam terhadap narasumber para pemimpin juga mereka warga masyarakat yang dipimpin.

REFERENSI

- Baiquni dan Susilawardani. 2002. *Pembangunan Yang Tidak Berkelanjutan: Refleksi Kritis Pembangunan Indonesia*. ideAs dan TransMedia. Yogyakarta.
- Baiquni, 2004, *Membangun Pusat-pusat di Pinggiran: Otonomi di Negara Kepulauan*. IdeAs Media dan PKPEK Yogyakarta.
- Baiquni, 2014. *Kepemimpinan Berkarakter Pancasila*. Makalah disampaikan pada kuliah umum di BATAN Yogyakarta.
- Baiquni, M. 2012. Keynote Speak Seminar *Pengembangan Model Pengelolaan Lintas Perbatasan Indonesia Malaysia* (BNPP, JPP UGM dan COLGIS UUM) Yogyakarta
- Bintarto, 1983. *Gotongroyong Sebagai Suatu Karakter Bangsa Indonesia*.
- Forbes, Dean K. 1986. *Geografi Keterbelakangan*. LP3ES Jakarta
- Fukuyama, Francis. 1995. *Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity*. Hamish Hamilton. London.
- Giddens, Anthony. 2001. *Runaway World: Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*. Gramedia. Jakarta
- Haq, Mahbub ul. 1983. *Tirai Kemiskinan: Tantangan-Tantangan untuk Dunia Ketiga*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Hindle, Tim. 2008. *Guide to Management Ideas and Gurus*. The Economist and Profile Book. London
- Ohmae, Kenichi. 1995. *The End of the Nation State: The Rise of Regional Economies*. HarperCollins Publishers. London.
- Roxborough, Ian. 1986. *Teori-Teori Ketergantungan*. Terjemahan dari *Theories of Underdevelopment 1979*. LP3ES. Jakarta
- Sasono, Adi dkk (ed.). 1993. *Pembangunan Regional dan Segitiga Pertumbuhan*. CIDES-Center for Information and Development Studies. Jakarta
- Seers, Dudley. 1979. *The Meaning of Development, with a Postscript*. In Seers, Nafziger, Cruise O'Brien, & Bernstein, pp. 9-30.
- Soesastro, Hadi. 1992. "Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Pasifik Barat Hingga Tahun 2010 dan Implikasinya Bagi Permintaan Energi" *Analisis CSIS Tahun XXI No. 6/1992*.
- Zuhal. 2010. *Knowledge and Innovation: Platform Kekuatan Daya Saing*. Gramedia. Jakarta.



PROF. DR. M. BAIQUNI, MA

- Professor in Faculty of Geography UGM.
- Drs in Hidrology Geography UGM, MA in Development Studies, ISS The Hague, Dr in Geography UGM/Utrecht U
- Head of Master and Doctoral Program in Tourism, Graduate School, UGM.
- Head Department of Development Geograhya, UGM
- Chairperson Board of Trustee INSIST (*Indonesian Society for Social Transformation*),
- Fellow LEAD (*Leadership for Environment And Development*) London.
- Lifetime member SID (*Society for International development*) Rome.
- Book writer, e.g: *Pembangunan Yang Tidak Berkelanjutan - Refleksi Kritis Pembangunan Indonesia (2002)*; *Membangun Pusat-Pusat Di Pinggiran - Otonomi di Negara Kepulauan (2004)*; *Ecofourism Destination in Archipelago Countries (2013)*; etc

Email: baiquni99@gmail.com
HP: 08122722102
Fakultas Geografi Universitas Gadjah
Mada, Bulaksumur 55281, Yogyakarta,
INDONESIA